

**IDENTIFIKASI *FLYPAPER EFFECT*
PADA KABUPATEN/KOTADI INDONESIA TAHUN 2018**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun oleh:

CYNTIA DEWI PERMATA SARI

11 15 27812

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
AGUSTUS, 2019**

SKRIPSI
IDENTIFIKASI *FLYPAPER EFFECT* PADA
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2018

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CYNTIA DEWI PERMATA SARI

No Induk Mahasiswa: 1115 27812

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I


Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Penguji


Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Pembimbing II


Deranika Ratna Kristiana, S.E., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IDENTIFIKASI FLYPAPER EFFECT PADA KABUPATEN/KOTA

DI INDONESIA TAHUN 2018

Cyntia Dewi Permata Sari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal serta untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu menggunakan seluruh populasi dengan kriteria tertentu sebagai sampelnya. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dan nilai t statistik PAD lebih besar dari nilai t statistik DAU hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect*.

Kata Kunci: belanja modal, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, *flypaper effect*.

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of PAD and DAU against on capital expenditure and investigate occur or may not occur flypaper effect in regencies/cities in Indonesia. The type of this research is quantitative research. The population in this research Regency/City in Indonesia in 2018. The determination of the sample using the purposive sampling that is using the entire population with certain criteria as the sample. The data collected is a secondary data with the documentation method. Data analysis techniques using multiple regression analysis double linier. The results of this research showed that the variables local revenues and the general allocation fund influence on capital spending and the value of the t statistic of the PAD is greater than the value of t statistic DAU show this phenomenon does not occur flypaper effect.

Key Words: capital spending, local revenues, the general allocation fund, *flypaper effect*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan karakteristik yang berbeda-beda dan sumber daya yang melimpah, sehingga setiap daerah memiliki potensi alam dan kebudayaan yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah secara maksimal untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya. Sistem pemerintahan sentralistik yang pernah dianut Indonesia pada masa orde baru mengakibatkan segala potensi di setiap daerah tidak mampu dikelola secara maksimal sehingga pada pembangunannya mengalami proses perubahan. Proses perubahan yang terjadi pada pembangunan di Indonesia terjadi pada sistem pemerintahannya yaitu dari sistem sentralistik berubah menjadi sistem desentralistik. Sistem desentralisasi pada masa reformasi baru dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 (Haryanto, 2015) dimana sistem ini lebih mengedepankan pembangunan di tiap daerah sehingga peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam upaya mendorong dan menggerakkan pemerintah Indonesia ke arah pembangunan.

Konsep desentralisasi fiskal atau yang biasa dikenal dengan sebutan *money follow function* mensyaratkan pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah yang akan dibarengi dengan pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan. Sehingga dapat diartikan bahwa pelimpahan wewenang ke pemerintah daerah akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan jumlah biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka hubungan antara keuangan pusat dengan keuangan daerah harus dikelola secara maksimal sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber yang ada (Rahmawati, 2015). Mekanisme dana

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perimbangan dapat dilakukan melalui proses pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Haryanto (2015) menyimpulkan bahwa dalam proses menjalankan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kebijakan antisipatif dan reaktif selalu didorong oleh pemerintah pusat sebagai upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah. Diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal pada hubungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang tersedia sehingga mendorong terciptanya kemandirian di daerah, dan juga pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam menghasilkan atau mencari sumber pendapatannya sendiri agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung dari pusat karena sudah memiliki desentralisasi pendapatannya sendiri.

Hasil evaluasi mengenai perimbangan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat bahkan dana transfer yang diterima dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaan, dari rata-rata nasional tingkat ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap transfer ke daerah sebesar 80,1% sedangkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 12,87% (Nugraha, 2019). Permasalahan mengenai ketergantungan fiskal pada pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat disebut sebagai fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi dimana pemerintah daerah lebih cenderung merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer yaitu DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yaitu PAD (Adiputra, 2014). Selain ketergantungan fiskal hal lain yang dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditimbulkan dari *flypaper effect* yaitu terjadinya asimetris pada saat terjadi perubahan fiskal ketika DAU meningkat maka pemerintah daerah akan membelanjakan tambahan pendapatan, namun ketika jumlah DAU berkurang belanja daerah tidak ikut berkurang (Junaidi, 2012). Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Identifikasi *Flypaper Effect* pada Kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2018”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Flypaper Effect*

Iskandar (2012) berpendapat bahwa *flypaper effect* ialah suatu keadaan stimulus yang terjadi pada pengeluaran daerah, dimana hal ini dapat diakibatkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) yang berasal dari pemerintah pusat nilainya lebih besar dari yang diakibatkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Istilah *flypaper effect* ini juga dikembangkan oleh Rahmawati (2015) yang menyimpulkan bahwa pemerintah daerah lebih sering menggunakan dana transfer dalam hal memperluas belanja publik dari pada pendapatan daerah melalui pengurangan pajak.

Asumsi yang dipakai untuk menentukan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada penelitian ini lebih berfokus tentang pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal. Rahmawati (2015) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi apabila nilai koefisien dari dana alokasi umum terhadap belanja modal memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada pendapatan asli daerah terhadap belanja modal serta kedua nilainya berpengaruh signifikan. Terjadinya fenomena *flypaper effect* juga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat dilihat dari hasil pengujian analisis yang menunjukkan kalau respon atau pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tidak signifikan.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Penelitian yang dilakukan oleh Bhal (2008) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pemberian kebebasan pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Terdapat tiga fungsi dalam sistem desentralisasi fiskal yaitu fungsi pendapatan, fungsi pembelanjaan, serta fungsi transfer antar pemerintah. Mekanisme dana perimbangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa mekanisme dana perimbangan keuangan merupakan suatu sistem untuk melakukan pandanaan atau pembagian keuangan yang bersifat proporsional, adil, transparan, demokratis, serta efisien kegiatan pendanaan desentralisasi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah, kondisi, potensi, serta jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah yang menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.4 Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut pendapat Siregar (2017) menyatakan bahwa DAU ditujukan untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) keuangan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, tujuan dana alokasi dialokasikan pada setiap daerah adalah untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat bersifat *block grant*, maksudnya dalam penggunaan dana transfer tersebut pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah tersebut sehingga dapat menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

2.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris. Hal ini sejalan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu atau dua periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja modal terdiri dari dua bagian yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja yang secara langsung manfaatnya dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dinikmati oleh masyarakat seperti pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Belanja aparatur adalah belanja yang secara langsung manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur misalnya pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

3. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaporkan laporan realisasi APBD tahun 2018. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu LRAPBD yang tidak bernilai nol (0) atau minus (-) pada tahun 2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data APBD yang dapat digunakan ialah data laporan hasil realisasi PAD, data laporan hasil realisasi DAU, serta realisasi belanja modal. Jenis data yang digunakan merupakan data *cross setion* untuk 471 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan (DJPK) yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.3 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang didapatkan dari sumber-sumber yang berasal dari dalam daerahnya masing-masing. Pemungutannya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta peraturan daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang diperoleh daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

3.3.2 Dana Alokasi Umum (X2)

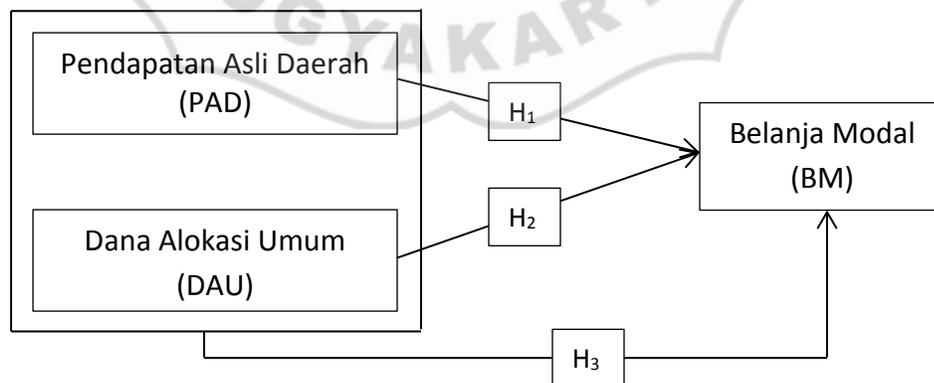
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai keperluan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.3.3 Belanja Modal (Y)

Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai variabel dependennya dimana belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

3.4 Rerangka Penelitian

Berikut adalah rerangka penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 1
Rerangka Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi berganda digunakan ketika dalam suatu penelitian terdapat lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan variasi variable dependennya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data baik digunakan atau tidak maka dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Total kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 508 kabupaten/kota yang di peroleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPk). Akan tetapi, dari 508 kabupaten/kota terdapat 37 data yang nilainya dianggap terlalu ekstrim atau tidak sesuai dengan data yang lain sehingga hanya 471 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah seleksi sampel penelitian:

Tabel 1
Seleksi Sample Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Kabupaten/kota yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.	508
3	Kabupaten/kota yang melaporkan realisasi anggaran di sektor PAD, DAU, dan belanja modal yang jumlahnya bernilai nol (0) atau minus (-).	(0)
4	Data outlier	(37)
Total		471

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari total 471 kabupaten/kota di Indonesia, selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Kesimpulan Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Status
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1495613308 03,038	150995433 69,238		9,905	,000	
	PAD	,316	,036	,401	8,873	,000	Diterima
	DAU	,121	,026	,213	4,719	,000	Diterima

a Dependent Variable: BM

Sumber: *Output* SPSS 15, data sekunder yang diolah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2018 terbukti, yaitu PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,542 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi sebesar 0,294 menunjukkan bahwa PAD memiliki kontribusi pengaruh terhadap belanja modal sebesar 29,4%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,873 dan t_{tabel} sebesar 1,960, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,873 > 1,960$) yang berarti pengaruh PAD terhadap belanja modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka belanja modal akan semakin meningkat, begitupula sebaliknya semakin rendah PAD maka belanja modal akan menurun. Hasil penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tolu, dkk (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan PAD sehingga akan meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu semakin besar PAD yang diperoleh dan pemanfaatan dari PAD yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2018 terbukti, yaitu DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,542 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi sebesar 0,294 menunjukkan bahwa DAU memiliki kontribusi pengaruh terhadap belanja modal sebesar 29,4%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,719 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,960, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4,719 > 1,960$) yang berarti pengaruh DAU terhadap belanja modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah DAU maka belanja modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peneliti yang dilakukan oleh Karwur, dkk (2018) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Transfer ini pengaruhnya cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Pada PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar DAU yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima, yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut, lalu pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belanja modal oleh pemerintah. DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu pembiayaan belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan uji statistik F yang menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen yaitu PAD, dan DAU terhadap variabel dependen yaitu belanja modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,542 menunjukkan hasil positif dan koefisien dan koefisien determinasi sebesar 0,294 yang berarti bahwa PAD, dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 29,4%. Hasil pengujian statistik uji F berupa nilai F_{hitung} sebesar 97,408 dan F_{tabel} sebesar 3,00, sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($97,408 > 3,00$) yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Paramartha, dkk (2016) yang menyatakan bahwa PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap belanja modal.

Identifikasi *flypaper effect* dapat dijelaskan melalui hasil dari perbandingan koefisien PAD terhadap belanja modal dengan koefisien DAU terhadap belanja modal, dengan ketentuan jika koefisien DAU > koefisien PAD maka terjadi *flypaper effect* namun jika koefisien PAD > koefisien DAU maka tidak terjadi *flypaper effect*. Hasil

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

uji koefisien standar beta pada tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien beta PAD sebesar 0,401 dan nilai koefisien beta DAU sebesar 0,213. Hal ini berarti koefisien beta PAD lebih besar dari koefisien beta DAU ($0,401 > 0,213$) dan hasil dari regresi menunjukkan bahwa nilai uji statistik t PAD memiliki pengaruh yang signifikan lebih besar yaitu 8,873, dibandingkan pengaruh DAU terhadap belanja modal yaitu sebesar 4,719. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD lebih berpengaruh terhadap belanja modal daripada DAU terhadap belanja modal, hal ini berarti fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak, yaitu PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,542 dan koefisien determinasi sebesar 0,294. Nilai $t_{hitung} 8,873 > t_{tabel} 1,960$.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,542 dan koefisien determinasi sebesar 0,294. Nilai $t_{hitung} 4,719 > t_{tabel} 1,960$.
- PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,542 dan koefisien determinasi sebesar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

0,294, serta nilai $F_{hitung} 97,408 > F_{tabel} 3,00$. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga selanjutnya bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* dengan membandingkan nilai koefisien beta PAD dengan nilai koefisien beta DAU. Nilai koefisien beta PAD 0,401 > nilai koefisien beta DAU 0,213, artinya fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018.

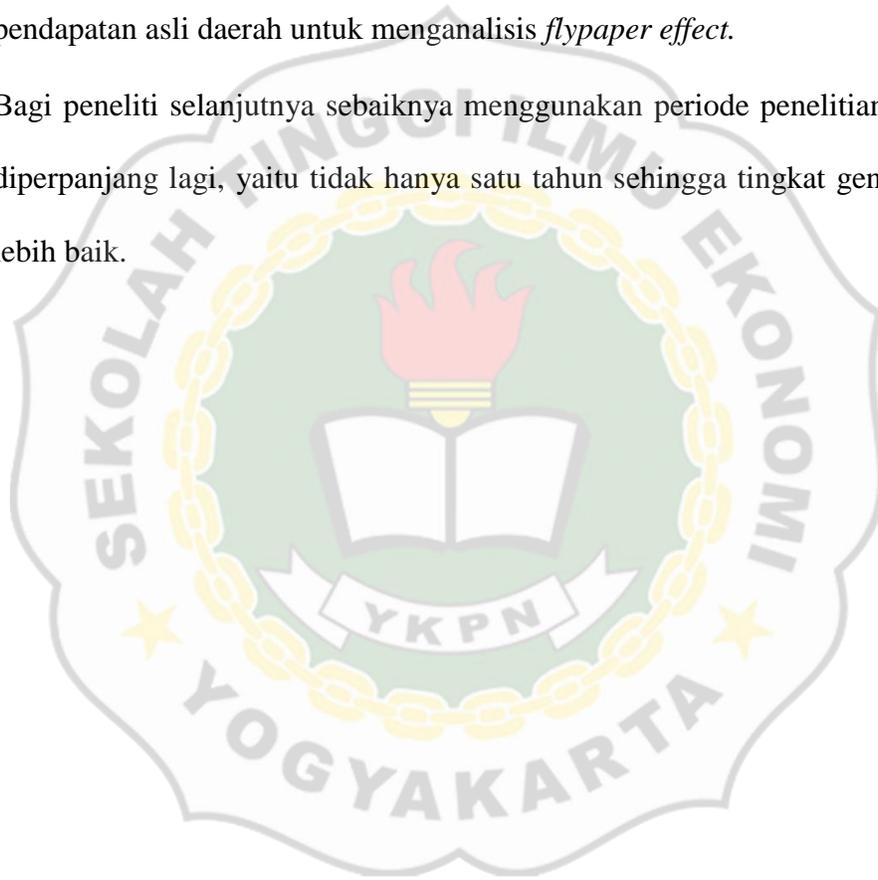
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini hanya menggunakan variabel dana transfer DAU sebagai pembanding dan mengabaikan variabel dana perimbangan lainnya, karena pada penelitian *flypaper effect* membandingkan variabel dana perimbangan dengan pendapatan asli daerah, sedangkan dana transfer dalam struktur APBD terdiri dari DAU, DBH, dan DAK.
- Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode satu tahun yaitu tahun 2018.
- Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber PAD agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
- Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya DAU untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
- Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam belanja modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah.

- Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan variabel dana perimbangan lain selain DAU sebagai pembanding dengan pendapatan asli daerah untuk menganalisis *flypaper effect*.
- Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode penelitian yang lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya satu tahun sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra. (2014). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika*.
- Bahl, R. (2008). The Pillars of Fiscal Decentralization. *Working paper, CAF Financiendo El Desarrollo, America Latina*.
- Haryanto, J. T. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved from <http://www.kemenkeu.go.id>
- Junaidi. (2012). Asimetri Pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra*.
- Nugraha, Y. N. (2019, Januari 20). *Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Retrieved Mei 23, 2019, from <http://www.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Rahmawati. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah.
www.djpk.kemenkeu.go.id